

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pembiayaan murabahah khususnya pada BPRS sudah banyak dibahas di tugas akhir, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya. Upaya dalam melihat posisi penelitian dalam tugas akhir ini, menjadi sangat penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan dari penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis ketahui mengenai pembiayaan bermasalah antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ellysa Puji Pangestu yang membahas tentang pembiayaan murabahah bermasalah yang berjudul “Analisis penanganan pembiayaan bermasalah murabahah (Studi kasus pada KSPPS BMT Hira Tanon)” dalam skripsinya tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah serta penanganannya. Menyatakan bahwa strategi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama dengan melakukan pendekatan kepada anggota. Kedua, penagihan secara intensif. Ketiga, teguran dengan melayangkan surat peringatan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Winda Anggraeni yang membahas tentang pembiayaan murabahah bermasalah yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan penanganan permasalahannya” dalam

skripsinya tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi serta cara penanganannya pada Bank Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung. Menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan yaitu dengan tindakan rescheduling, reconditioning, restructuring.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan pembiayaan murabahah serta perkembangan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah di PT BPRS Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo, serta faktor yang menjadi penyebab adanya pembiayaan murabahah yang bermasalah serta bagaimana cara menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah tersebut.

## **B. Bank Perkreditan Rakyat Syariah**

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun maksud dan tujuan perusahaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah mengusahakan perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu bank yang melaksanakan aktivitas usahanya tersebut berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau

transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi dari BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana. Adapun yang dimaksud penghimpunan dana, penyaluran dana serta maksud dari tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran yaitu: (ismail, 2015:54).

#### 1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank Perkreditan Rakyat Syariah menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan wadiah, mudharabah, dan deposito mudharabah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah harus sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

#### 2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank Perkreditan Rakyat Syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini bank memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

#### 3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tidak Melaksanakan Transaksi Lalu Lintas Pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu bank tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Hal inilah yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan BPRS (Ismail, 2015:54).

## **C. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad Murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut margin keuntungan (Ismail, 2015:138).

Pengertian Murabahah menurut Fatwa DSN No. 04/ DSN/ MUI/ IV/ 2000 menjelaskan bahwa Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pada dasarnya Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian nasabah merupakan pembeli barang tersebut melalui pihak bank. Bank yang akan menyediakan barang tersebut, yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari pihak supplier, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli dari supplier yang dilakukan oleh pihak bank syariah tersebut. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati diawal perjanjian.

## 2. Landasan Hukum Akad Murabahah

Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275)

Dalam firman Allah tersebut jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu juga sudah jelas diharamkan.

## 3. Rukun dan syarat Murabahah

Rukun merupakan sesuatu hal yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalkan adanya penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka tidak akan ada transaksi jual beli. Rukun tersebut yaitu:

### a. Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

### b. Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

c. Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya atau harus nyata.

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

e. Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli (Ismail, 2015:136).

Selain adanya rukun dalam pembiayaan murabahah juga terdapat syarat-syarat yang akan menjadi pedoman dalam pembiayaan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Pihak yang Berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

b. Objek Jual Beli

- (1) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).
- (2) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

- (3) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang halal dan barang berwujud.

c. Harga

- (1) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
- (2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- (3) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli (Ismail, 2015:137).

**D. Pembiayaan Bermasalah**

**1. Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Kasmir, 2007:96).

**2. Fungsi pembiayaan**

Pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya khususnya

pada masyarakat menengah kebawah. Berikut adalah fungsi dari pembiayaan tersebut yang meliputi:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar antara barang dan jasa.
- b. Pembiayaan adalah alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Idle fund yang dimaksud yaitu bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada (Ismail, 2015: 108).

### **3. Manfaat Pembiayaan**

- a. Manfaat pembiayaan bagi bank
  - (1) pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah atau mitra akan mendapatkan balas jasa yang berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan diawal.
  - (2) pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
  - (3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan



wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan.

- (4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor usaha.

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- (1) Meningkatkan usaha dari nasabah.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya produksi.
- (3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (4) Pihak bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, yang berupa transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh pihak nasabah.
- (5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- (1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- (2) Pembiayaan bank dapat dipergunakan sebagai alat pengendali moneter.

- (3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- (4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain: pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- (1) Mengurangi tingkat pengangguran.
- (2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, asuransi. Pihak tersebut diperlukan bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- (3) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- (4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya letter of credit, bank garansi, tranfer, kliring dan jasa lainnya (Ismail, 2015: 110).

#### **4. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas yang kurang lancar, diragukan dan macet.

Ada beberapa arti dalam pembiayaan bermasalah adalah:

- a. Pembiayaan yang tidak lancar.
- b. Pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.

- c. Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran.
- d. Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan.
- e. Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Pembiayaan yang dimaksud dari pembiayaan yang lancar yaitu tidak terdapatnya tunggakan angsuran pokok, jika ada tunggakan dari angsuran pokok tersebut tetapi tidak sampai melampaui satu bulan yaitu yang dimaksud dari tidak lancar. Selanjutnya yang dimaksud dari kurang lancar yaitu terdapat tunggakan dari angsuran pokok yang melampaui satu bulan tapi belum sampai melampaui dua bulan. Serta yang dimaksud dari macet yaitu belum adanya pelunasan dan penyelesaian pembiayaan yang diserahkan kepada pihak lain.

#### **5. Kategori Pembiayaan Bermasalah**

Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektabilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Lancar**

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

##### **b. Dalam Perhatian Khusus**

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan

agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi dari perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada (Faturrahman Djamil, 2012).

Menurut pengertian diatas maka yang dimaksud dari dalam kriteria pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak terbayarkan oleh debitur

atau nasabah termasuk dalam kriteria yang bermasalah ada 4 (empat) golongan, yaitu meliputi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Agar dana pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh pihak dari PT BRPS Bumi Rinjani Batu aman dan menguntungkan, maka sebaiknya petugas atau account officer pembiayaan harus mencari calon anggota pembiayaan yang amanah dan dapat dipercaya. Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota atau calon nasabah pembiayaan pilihan dan sesuai dengan kriteria yang layak untuk dibiayai harus memenuhi 5 C yaitu sebagai berikut:

a. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah tersebut, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penelitian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability.

c. Capital

Capital yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

d. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian dari kondisi atau prospek dalam bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif lebih kecil.

e. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin (Kasmir, 2002).

## **6. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum pembiayaan yang bermasalah disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada

didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.

Selanjutnya dari unsur yang kedua yaitu dari pihak nasabah (faktor ekstenal). Faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen pihak bank seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lainnya. Pada dasarnya faktor eksternal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, dimana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dari pihak nasabah. Pada dasarnya faktor ekstenal adalah faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang bermasalah dari luar lembaga keuangan yang meliputi: musibah, musim, serta peraturan pemerintah (Faturrahman Djamil, 2012:73).

## **7. Pemantauan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Dalam aktivitas pembiayaan, pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank sudah cukup baik namun ada saja pembiayaan yang telah dipantau tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dari pihak bank syariah dan masih ada pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Adapun banyak cara yang dapat dilakukan dari pihak bank syariah dalam mengatasi atau menangani pembiayaan yang bermasalah tersebut. Tergantung dari seberapa berat atau ringannya

permasalahan yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Jika pembiayaan tersebut masih dapat diharapkan akan berjalan dengan baik, maka pihak bank syariah dapat memberikan keringanan misalnya dengan menunda jadwal angsuran (rescheduling). Selanjutnya bila pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan oleh kelalaian, pelanggaran maupun kecurangan dari pihak nasabah sendiri maka pihak bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera termasuk dengan penyerahan barang yang digunakan kepada pihak bank. Penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan tidak dapat dicapai maka pihak bank dapat menempuh jalur hukum. Dalam hal tersebut ada cara yang dapat ditempuh yaitu pengadilan negeri agama atau badan arbitrase.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu sebagai berikut:  
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- (1) Penjadwalan kembali (rescheduling)

Yaitu proses dari perubahan jadwal pembayaran angsuran pokok nasabah atau jangka waktunya.

- (2) Persyaratan kembali (reconditioning)



Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

(3) Penataan kembali (restructuring)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

- (a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- (b) Konversi akad pembiayaan.
- (c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- (d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah (Faturrahman Djamil, 2012:83).